

Bab 1

# PENDAHULUAN

## Bab 1

# PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan Kesehatan di Provinsi Riau adalah Riau Sehat 2020. Dengan rumusan ini dimaksudkan bahwa pada tahun 2020 kelak masyarakat Riau sudah hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta dapat memilih, menjangkau dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan adil sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal.

Dalam Riau Sehat 2020, lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, serta perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan.

Perilaku masyarakat yang diharapkan pada 2020 adalah yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.

Indikator kesehatan merupakan salah satu sarana untuk memantau pencapaian Riau Sehat 2020 dan evaluasi tahunan terhadap kinerja kegiatan dalam mencapai Riau Sehat 2020. Untuk itu, maka kabupaten/kota di Provinsi Riau perlu menetapkan indikator Sehat dengan mengacu pada Indikator Indonesia Sehat dan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Indikator Indonesia Sehat terdiri atas:

1. Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi.
2. Indikator hasil antara yang terdiri atas indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup akses dan mutu pelayanan kesehatan.
3. Indikator proses dan masukan yang terdiri atas indikator-indikator untuk pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait.

Indikator kesehatan juga merupakan salah satu ukuran dalam melihat keberhasilan pembangunan suatu negara maupun wilayah. Ukuran kematian ibu melahirkan, kematian bayi, usia harapan hidup penduduk disuatu wilayah merupakan ukuran lazim yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, keseluruhan indikator tersebut, secara langsung akan berkaitan pula dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keadaan lingkungan serta perilaku masyarakat di bidang kesehatan.

Berdasarkan Undang–Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,

peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Kesehatan merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat kompleks dan memegang peranan strategis dalam peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan dapat diukur dari beberapa indikator antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Kasar (AKK) dan Usia Harapan Hidup (Eo).

Untuk kondisi Indonesia, Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate = MMR) masih tinggi, yaitu 390 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate = IMR) mencapai 326 per 1000 bayi lahir. Selain kedua permasalahan tersebut hal lain yang menjadi sangat urgent untuk ditangani adalah masalah kesehatan balita terkait dengan gizi balita, imunisasi balita dan permasalahan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan kesehatan, sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan kesehatan yang kompleks. Identifikasi terhadap permasalahan tersebut antara lain adalah terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, rendahnya kualitas gizi balita, perilaku hidup masyarakat yang kurang menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sarana sanitasi yang kurang mendukung, serta terbatasnya tenaga kesehatan yang tersebar tidak merata. Ke semua hal tersebut ditunjang pula oleh kondisi daerah yang berada secara geografis pada dataran rendah yang berawa (3-5 m dari permukaan air laut) menyebabkan kondisi lingkungan hidup masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang mampu mendukung PHBS.

Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Riau dalam bidang kesehatan adalah rendahnya kualitas kesehatan

penduduk, yang antara lain ditunjukkan dengan tingginya Jumlah Kematian Bayi tahun 2006 mencapai 1.272 kasus, sedangkan Jumlah Kematian Ibu maternal mencapai 179 kasus. Dari bulan Januari sampai Agustus 2007, kasus kematian bayi menurun menjadi 745 kasus, sementara jumlah kematian ibu mencapai 129 kasus (*Koran Tribun*, 16 Desember, 2007).

Rendah status gizi balita dimana pada Tahun 2006 adalah 2,5 % balita gizi buruk dan 11,5 % balita gizi kurang. Selanjutnya yang masih menjadi masalah ialah tingginya angka kejadian penyakit menular setiap tahunnya terus meningkat terutama untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria. Pada tahun 2006 angka kesakitan DBD 732 kasus dengan angka kesakitan 16,3 per 100.000.

Sedangkan untuk malaria sebanyak 22.230 kasus dengan *Annual Malaria Incidence (AMI)* berkisar 9,32 – 13,92 per 1000 penduduk. Selain itu juga kesejangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar Kabupaten/Kota belum memadai, penyediaan sarana kesehatan harus dibarengi dengan akses dan mutu pelayanan kesehatan, hal ini masih menjadi kendala karena secara keseluruhan jumlah tenaga dokter dan para medis masih kurang dan penyebaran komposisi tenaga medis yang tidak optimal. Ini terlihat dari ratio tenaga dokter terhadap 100.000 penduduk 21,17 berarti 1 dokter melayani 4,724 penduduk, dan mutu tenaga kesehatan serta penataan manajemen kesehatan masih harus dibenahi.

Melihat beberapa permasalahan yang sangat strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan program pembangunan kesehatan secara berkesinambungan melalui program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I). Salah satu dari program tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia, namun hasil yang diharapkan dari pengelolaan program tersebut masih belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pembangunan kesehatan

yang dilaksanakan belum mencapai sasaran dan belum menjawab permasalahan kesehatan secara komprehensif. Oleh karena itu, kajian terhadap MMR (Angka Kematian Ibu Melahirkan), Angka Kematian Bayi (IMR), dan indikator-indikator derajat kesehatan di Provinsi Riau sangat perlu untuk dilakukan. Secara garis besarnya kajian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengukur Angka Kematian Ibu-AKI (Maternal Mortality Rate = MMR), Angka Kematian Bayi-AKB (Infant Mortality Rate = IMR) Angka Kematian Balita-AKABA, Angka Kekurangan Gizi Balita, angka kematian kasar (AKK) dan usia harapan hidup (Eo).
2. Mengukur tingkat keberhasilan/pencapaian imunisasi balita. Imunisasi yang disediakan oleh pemerintah adalah dimaksudkan untuk mencegah anak-anak dari resiko kesakitan, yang disebabkan oleh berbagai penyakit utama.
3. Mengukur keluhan kesakitan/kesehatan, morbiditas dan rata-rata lama sakit masyarakat.
4. Mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan yang terkait dengan program GOBI (*Growth Monitoring, Oral Rehidration Therapy, Breastfeeding Promotion dan Immunization*), yaitu empat pelayanan setiap bulan yang disepakati antara kader dengan dokter atau tenaga medis lainnya di setiap Puskesmas.
5. Mengukur partisipasi dan permasalahan program keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan pelayanan kepada *target group* agar dapat mengendalikan angka kelahiran secara terencana, dan pada gilirannya akan dapat menurunkan angka kelahiran dan kematian.
6. Mengevaluasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan didefinisikan sebagai ada atau tidaknya masyarakat memperoleh layanan kesehatan dari pemerintah.
7. Menganalisis masalah kesehatan lainnya yang berkaitan

dengan lingkungan kesehatan, sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat.

8. Menganalisis program bidang kesehatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Propinsi Riau.
9. Merumuskan strategi kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang seharusnya dilaksanakan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan tujuan Millenium Development Goals (MDG's).\*\*\*

